



---

*CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.*

---

## **CSIS Commentaries PSC-001**

*26 March 2020*

# **Dari Partai Pemenang menjadi Partai Menengah: Studi Kondisi Elektoral Partai Demokrat**

Arya Fernandes

*Peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS*

[arya.fernandes@csis.or.id](mailto:arya.fernandes@csis.or.id)

Partai Demokrat berhasil menyelesaikan Kongres partai yang ke-5 pada pertengahan Maret 2020 lalu. Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah memimpin partai sejak Maret 2013. Agus nyaris dengan mudah terpilih sebagai ketum: tidak ada penantang, dan tidak ada suara-suara penolakan. Di tengah situasi tersebut, ujian politik Agus ke depan cukup sulit. Ia menghadapi situasi internal dan eksternal partai yang lebih rumit dibandingkan saat partai ini didirikan. Secara internal, terjadi tren penurunan suara dan kursi Demokrat dari pemilu ke pemilu serta ketatnya kompetisi politik di partai papan tengah. Secara eksternal, Demokrat menghadapi situasi peningkatan suara partai-partai papan tengah dan munculnya kompetitor dari partai-partai baru.

Tulisan ini melihat bagaimana Demokrat bisa keluar dari jebakan partai papan tengah dengan melakukan pelembagaan politik internal melalui demokratisasi dan kompetisi internal yang solid. Studi tentang Demokrat menjadi penting untuk mengetahui bagaimana partai pemenang pemilu dan partai penguasa bisa terlempar dan mengalami penurunan suara. Ada tiga asumsi yang bisa menjelaskan penurunan suara Demokrat, yaitu, disharmoni dan konflik internal yang memicu migrasi kader ke partai lain, tidak adanya inovasi dan perubahan strategi politik yang signifikan dalam dua pemilu terakhir, serta pengaruh kasus hukum yang terjadi.

### Situasi Internal

Ada beberapa situasi internal yang mempengaruhi penurunan suara Demokrat. *Pertama*, tidak adanya inovasi politik dan posisi partai yang terlambat beradaptasi dengan situasi politik yang berubah. Hal tersebut memicu terjadinya penurunan tajam suara Demokrat pada pemilu 2014 dan 2019. Pada pemilu 2009, Demokrat tampil sebagai partai pemenang dan menguasai 148 kursi di parlemen. Perolehan kursi tersebut belum mampu dilampaui PDI Perjuangan dalam dua pemilu terakhir. Pada 2009 juga, SBY kembali terpilih untuk periode kedua dengan perolehan suara 60.8 persen suara—rekor yang belum terlampaui sampai sekarang. Namun, dalam dua pemilu terakhir, perolehan suara dan kursi Demokrat terus mengalami penurunan yang signifikan. Saat pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2004, Demokrat mendapatkan 55 kursi, lalu naik ke 148 pada pemilu 2009. Pada pemilu 2014 suara Demokrat turun ke 61 kursi dan turun lagi menjadi 54 kursi pada pemilu 2019 (Lihat tabel 1).

**Tabel 1**  
**Perolehan Kursi Partai dari Pemilu ke Pemilu**

<b>Partai</b>	<b>Pemilu 1999</b>	<b>Pemilu 2004</b>	<b>Pemilu 2009</b>	<b>Pemilu 2014</b>	<b>Pemilu 2019</b>
<b>PDIP</b>	153	109	94	109	128
<b>Golkar</b>	120	128	107	91	85
<b>Gerindra</b>			26	73	78
<b>Nasdem</b>				35	59
<b>PKB</b>	51	52	31	47	58
<b>Demokrat</b>		55	148	61	54
<b>PKS</b>	6	45	57	40	50
<b>PAN</b>	35	53	45	49	44
<b>PPP</b>	59	58	35	39	19
<b>Hanura</b>			17	16	
<b>Lainnya</b>	38	50			
<b>Total Kursi</b>	<b>462</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>575</b>

*Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) (diolah)*

Dalam 10 tahun terakhir, bila dilihat secara agregat pada level zonasi, Demokrat kehilangan kursi/suara yang signifikan di pulau Jawa sebesar 52 kursi. Pada pemilu 2009, Demokrat mendapatkan kursi sebanyak 79 di pulau Jawa dan pada pemilu 2019 menyisakan 27 kursi. Penurunan paling tinggi terjadi terjadi di Jawa Barat, di mana Demokrat kehilangan 18 kursi dibandingkan 2009 lalu. Pada pemilu 2009, Jawa Barat menyumbang 28 kursi atau hampir 20 persen dari 148 kursi Demokrat pada pemilu 2009. Penurunan yang tajam juga terjadi di Jawa Timur dan Sumatera. Di Jawa Timur, Demokrat kehilangan 14 kursi dan 22 kursi di Sumatera dibandingkan pemilu 2009 (Lihat tabel 2).

Di tengah tren penurunan kursi Demokrat dari pemilu ke pemilu, partai-partai kompetitor terutama dari partai papan tengah, justru semakin terkonsolidasi. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada partai papan tengah yang mengalami penurunan setajam Demokrat. Demokrat kehilangan sekitar 63.5 persen kursinya dari 148 kursi pada 2009. Di partai-partai menengah, perolehan kursi secara umum mengalami tren kenaikan (seperti Nasdem, PKB, dan PKS). Meskipun terdapat juga yang mengalami penurunan, seperti PPP dan PAN—namun penurunannya tidak setajam Demokrat. PPP misalnya hanya kehilangan 45.7 persen dari 35 kursi (2009) menjadi 19 kursi (2019): angka yang masih rendah dari Demokrat yang kehilangan 63.5 persen kursi di periode yang sama.

Dengan ketatnya kompetisi di level partai papan tengah, Demokrat harus melakukan evaluasi menyeluruh soal strategi politik pada level daerah pemilihan (dapil). Dari sisi dapil, elit politik Demokrat menghadapi situasi yang berat karena adanya perubahan strategi partai-partai tengah yang banyak merekrut mantan kepala daerah, klan dari dinasti politik lokal, serta orang kuat lokal untuk dicalonkan dalam pemilu.

Sementara dari sisi pencalonan, tidak terdapat inovasi politik yang dilakukan oleh Demokrat. Demokrat juga tidak berhasil merebut kembali basis politiknya pada pemilu sebelumnya, dan cenderung kehilangan kursi di dapil-dapil yang menjadi lumbung suara Demokrat di pemilu sebelumnya. Bila Demokrat tidak mengubah pendekatan politiknya di tingkat lokal, Demokrat akan kesulitan menghadapi kompetisi yang semakin ketat, terutama dengan mulai terkonsolidasinya partai-partai baru, seperti Perindo, PSI dan Berkarya.

**Tabel 2**  
**Tren Perolahan Kursi Partai Demokrat Per Wilayah**

Keterangan	Jumlah Kursi Demokrat di DPR RI		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
<b>Pulau</b>			
<b>Jawa</b>	79	29	27
<b>Luar Jawa</b>	69	32	27
<b>Zona Jawa</b>			
<b>DKI Jakarta + Banten</b>	14	4	5
<b>Jawa Barat</b>	28	9	10
<b>Jawa Tengah + Yogyakarta</b>	16	5	5
<b>Jawa Timur</b>	21	11	7

<b>Zona Luar Jawa</b>			
<b>Sumatera</b>	36	15	14
<b>Kalimantan</b>	7	2	3
<b>Bali Nusra</b>	8	5	4
<b>Sulawesi + Gorontalo</b>	12	7	5
<b>Maluku + Papua</b>	6	3	1
<b>Total Kursi</b>	<b>148</b>	<b>61</b>	<b>54</b>

*Sumber: www.kpu.go.id (diolah)*

Situasi internal *kedua* yang mempengaruhi penurunan suara Demokrat adalah kegagalan Demokrat melakukan konsolidasi internal, terutama mengerem laju migrasi elit partai ke partai lain, yang sudah terjadi sejak pecahnya konflik internal partai pada tahun 2013. Pola migrasi elit terutama petahana DPR kembali berlanjut pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 lalu, terdapat empat inkumben legislatif dari Partai Demokrat periode 2014-2019 yang migrasi ke partai lain. Empat inkumben tersebut adalah Rudi Hartono Bangun (Dapil Sumatera Utara II), Fandi Utomo (Jawa Timur I), M. Syamsul Luthfi (NTB II) dan Salim Menga (Sulawesi Barat). Dari empat caleg petahana tersebut, dua caleg berhasil terpilih yaitu Rudi Hartono Bangun dan M. Syamsul Luthfi yang kembali maju di Dapil yang sama.

*Ketiga*, tidak berhasilnya platform kampanye Demokrat untuk menarik pemilih milenial. Usaha Demokrat untuk menarik pemilih milenial tidak efektif dilakukan. Mesin-mesin partai tidak bekerja maksimal untuk meng-aktivasi program milenial partai. Apalagi pada saat yang sama, Agus Yudhoyono sebagai ikon milenial partai kehilangan momentum di pemilu kemarin.

### **Basis Politik**

Secara sosio-demografi, hasil *exit poll* CSIS dan CN pada 17 April 2019<sup>1</sup> menunjukkan pemilih Demokrat berada di pulau Jawa. Bila dibandingkan dengan partai lain, komposisi pemilih Demokrat relatif berimbang antara Jawa dan luar Jawa, sebesar 53.4 persen dari pemilih Demokrat berada di Pulau Jawa dan 46.6 persen berada di luar Pulau Jawa (Lihat tabel 3). Sementara dari sisi kategori usia, 47.5 persen pemilih Demokrat adalah mereka yang berusia 17-35 tahun yaitu pemilih milenial, dan sisanya 52.5 persen adalah pemilih yang berusia di atas 35 tahun. Sementara dari sisi pilihan presiden, sebesar 59,7 persen pemilih Demokrat memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan 34,2 persen memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sisanya tidak menjawab dan rahasia. Saat ditanyakan preferensi pemilih Demokrat pada pilpres 2014 lalu, sebesar 42,6 persen mengaku memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan 36,5 persen memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, serta sisanya menjawab rahasia atau tidak menjawab.

<sup>1</sup> Dalam *exit poll* petugas lapangan mewawancarai pemilih yang telah selesai memilih pada TPS sample yang telah ditentukan. *Exit poll* dilakukan di 2002 TPS yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Penentuan TPS menggunakan metode *multistage randon sampling*. Pada setiap TPS sample diwawancarai 4 orang responden, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dalam *exit poll* ini sebesar 7.988 sample berhasil diwawancara (atau sebesar 99.75%) dari target 8.008 sample.

**Tabel 3**  
**Sebaran Pemilih Partai Berdasarkan Zona**

<b>Keterangan</b>	<b>Jawa</b>	<b>Luar Jawa</b>	<b>Total</b>
<b>Pilihan Partai</b>			
<b>PKB</b>	78.9%	21.1%	100%
<b>Gerindra</b>	56.0%	44.0%	100%
<b>PDI P</b>	60.8%	39.2%	100%
<b>Golkar</b>	55.5%	44.5%	100%
<b>Nasdem</b>	46.6%	53.4%	100%
<b>Garuda</b>	55.6%	44.4%	100%
<b>Berkarya</b>	68.3%	31.7%	100%
<b>PKS</b>	62.3%	37.7%	100%
<b>Perindo</b>	54.5%	45.5%	100%
<b>PPP</b>	72.5%	27.5%	100%
<b>PSI</b>	79.5%	20.5%	100%
<b>PAN</b>	56.7%	43.3%	100%
<b>Hanura</b>	35.7%	64.3%	100%
<b>Demokrat</b>	53.4%	46.6%	100%
<b>PBB</b>	33.3%	66.7%	100%
<b>PKPI</b>	18.2%	81.8%	100%
<b>Rahasia/tidak jawab</b>	49.5%	50.5%	100%

*Sumber: CSIS dan CN (2019)*

Dari sisi elit partai, Sensus CSIS pada tahun 2015<sup>2</sup> menemukan sebagian besar pimpinan Demokrat di daerah berpendidikan sarjana ke atas dan dari sisi usia didominasi dari usia 36 sampai 55 tahun. Dari sisi kepemimpinan internal, sensus menemukan tidak terjadi sirkulasi elit dan *vote-getter* baru pada level nasional. Saat ditanyakan tokoh pada level nasional yang dianggap dapat meningkatkan perolehan suara partai, di atas 70 persen menjawab SBY. Sementara dari sisi figur yang sering berkomunikasi ke daerah juga terbatas ke beberapa nama, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Marzuki Alie. Di tahun 2015, hampir 80 persen responden melihat SBY sebagai figur utama yang dapat membesarkan partai. Tidak muncul nama figur lain yang dianggap berpotensi membesarkan partai.

<sup>2</sup> Sebagai catatan, pada tahun 2015, CSIS melakukan sensus partai dengan mewawancarai pimpinan 4 partai politik pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. 4 partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, dan PAN. Dari sisi responden, sensus berhasil mewawancarai 469 pimpinan partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, *setting* kelembagaan partai memang terlalu kuat pengaruh SBY. Padahal bila dilihat di daerah, aspirasi kader terbuka terhadap nama-nama di luar klan SBY. Saat ditanyakan apakah klan Yudhoyono harus memimpin Demokrat pada 2015, sebesar 77,8 persen mengatakan tidak harus, 20 persen mengatakan harus berasal dari klan Yudhoyono, dan sisanya tidak menjawab.

### Modalitas Politik

Di tengah tren penurunan suara partai, Demokrat sebenarnya memiliki sejumlah modalitas yang bisa menjadi modal Demokrat untuk bisa *survive*. *Pertama*, pengaruh politik elit Demokrat di tingkat lokal dan tingginya tingkat penerimaan partai-partai lain terhadap pilihan politik Demokrat dalam Pilkada. Studi CSIS (2018) menunjukkan pola koalisi Demokrat pada tingkat lokal sangat terbuka dengan partai-partai lain pada Pilkada serentak 2018.

Bila dibandingkan partai lainnya, Demokrat paling banyak berkoalisi dengan tingkat rata-rata koalisi sebesar 57, disusul Golkar (56) dan Nasdem (56). Ketiga partai tersebut menjadi jangkar koalisi dalam pilkada lalu (Lihat tabel 4).

Bahkan, bila dilihat jumlah koalisi Demokrat dengan PDI Perjuangan juga relatif bagus. PDIP berkoalisi dengan Demokrat di 60 daerah, dengan rincian 47 koalisi di luar Jawa dan 13 koalisi di pulau Jawa. Angka koalisi PDI Perjuangan dengan Demokrat dan PPP lebih tinggi dibandingkan partai lain. Dalam Pilkada 2018 lalu, Demokrat mengikuti Pilkada di 160 daerah dari 171 daerah (provinsi, kabupaten/kota).

**Tabel 4**  
**Pola Koalisi Partai dalam Pilkada 2018**

Keterangan	Demokrat	Gerindra	Golkar	PPP	PDI-P	PKS	PKB	PBB	PAN	Nasdem	Hanura	PKPI	Rata-Rata
Demokrat		59	70	64	60	56	58	31	69	69	53	41	57
Gerindra	59		65	62	48	70	51	33	73	54	44	30	53
Golkar	70	65		58	57	51	64	34	59	76	55	36.0	56
PPP	64	62	58		60	44	53	31	58	60	50	24	51
PDI-P	60	48	57	60		33	56	31	57	56	52	34	49
PKS	56	70	51	44	33		39	28	64	61	29	21	45
PKB	58	51	64	53	56	39		29	53	57	44	29	48
PBB	31	33	34	31	31	28	29		30	34	26	23	30
PAN	69	73	59	58	57	64	53	30		61	50	29	54
NASDEM	69	54	76	60	56	61	57	34	61		52	38	56
HANURA	53	44	55	50	52	29	44	26	50	52		36	44
PKPI	41	30	36	24	34	21	29	23	29	38	36		31

Modalitas *kedua* adalah pengalaman Demokrat sebagai partai pemerintah dan pengalaman dua periode kepemimpinan SBY. Di masa SBY muncul sejumlah inisiatif-inisiatif baru terutama soal bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Keluarga Harapan (PKH), Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin

(Raskin), dan program-program lainnya. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik juga terjadi dalam masa kepemimpinan SBY. Dalam periode 2009-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,9 persen dan Indonesia berhasil menjadi anggota G-20 (CNN Indonesia, 20 Oktober 2014).

## **Penutup**

Reformasi dan inovasi politik di internal adalah kunci penting agar Demokrat bisa *survive* dalam kompetisi politik yang semakin ketat, apalagi bisa nanti angka *parliamentary threshold* dinaikkan. Dari sisi kelembagaan partai, demokratisasi dan kompetisi internal yang terbuka dan transparan dapat diprioritaskan oleh Demokrat. Proses pengambilan kebijakan harus melibatkan banyak pengurus dan elit. Begitu juga terkait kandidasi dalam pilkada dan pileg harus ada desain kelembagaan yang membuat setiap kader punya kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan. Desain penguatan *under-bow* dan badan otonom lain di partai juga harus dilakukan sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan internal.

Selain itu, perubahan strategi elektoral harus ditempuh. Demokrat harus terbuka dan lentur dengan alternatif-alternatif politik dan fokus pada pembenahan elektoral di pulau Jawa.

**CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160**

**Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | [csis.or.id](http://csis.or.id)**

**Editors**

*Philips J. Vermonte, Vidhyandika Perkasa, Beltsazar Krisetya*